

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingannya, Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan di Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan rencana kinerja tahun ke IV yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dishub Kabupaten Nias Selatan 2021-2026. Renja SKPD menggambarkan target kinerja Tahun 2025 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju good governance.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Penyusunan Renja SKPD ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan ini.



Telaumbanua, 29 Juli 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nias Selatan,

OMEGA TELAUMBANUA, SKM., MM
Pembina
NIP. 198311112006111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	13
2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	14
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	17
3.3 Program dan Kegiatan	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB V PENUTUP	22
4.a Catatan Penting	22
4.b Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	22
4.c Rancana tindak lanjut	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan. Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini akan digunakan sebagai bahan masukan dan arahan (guidelines) dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Urusan Perhubungan yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang diampu Dinas Perhubungan Nias Selatan.

Renja Dinas Perhubungan kabupaten Nias Selatan adalah Dokumen Perencanaan untuk penyesuaian Perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026 dan Rancangan Akhir RPD 2021 – 2026.

Nomenklatur kegiatan dalam rencana kerja (renja), selain mengacu kepada Matriks Rancangan Akhir RPD 2021-2026 juga harus mengacu kepada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan Jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sehingga diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas bagi penjaringan usulan kegiatan untuk Tahun 2025 pada urusan Perhubungan sebagai bahan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 maupun Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan, yang merupakan bahan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025.

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan. Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dishub selama lima tahun yang akan datang.

Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai di Tahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2025. Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan tersebut diuraikan target Dinas Perhubungan Tahun 2025 serta besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini adalah :

1. Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan;
 17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026;
 18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.
 19. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/68/2024 Lampiran XIV tentang Penetapan Tim Penyusun RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan 2025 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini antara lain adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan Program/Kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Perhubungan.
3. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dishub Kabupaten Nias Selatan.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target Kinerja Program dan Kegiatan Tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.
5. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2025 serta dana yang dibutuhkan.
6. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.
7. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.
8. Sebagai bahan Evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan selama Tahun 2025. Target kinerja (performance targets) Tahun 2025 tersebut nantinya menjadi acuan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Sistematika penyajian Renja Dishub Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

- Bab I - **Pendahuluan :**
 - 1.1 Latar belakang,
 - 1.2 Landasan hukum,
 - 1.3 Maksud dan tujuan,
 - 1.4 Sistematika penulisan;
- Bab II - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu,
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat
- Bab III - Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah
 - 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.
 - 3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah
 - 3.3 Program dan kegiatan
- Bab IV - Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V - Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 berdasarkan realisasi kinerja anggaran.

Realisasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai yang direncanakan adalah sebagai berikut ;

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

1. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberang dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada APBD tahun 2024 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Realisasi Program

dan Kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun – Tahun sebelumnya. Reviuw hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan/atau Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana walaupun dipertengahan tahun terdapat program revocussing, namun dapat diselesaikan pada saat APBD Perubahan. Dari 3 (tiga) program dengan 16 (Enam belas) kegiatan, 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 90%. Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 90% merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d Desember).

Capaian Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 sebesar 100% dari Target 100%. Sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 7 (tujuh) Kegiatan yang semuanya dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai yang diharapkan sehingga Capaian Indikator Kinerja Program dapat tercapai dengan baik.

Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Tahun 2023 sebesar 40% dari Target 100% ini capaian yang diluar ekspektasi yang membutuhkan kerja maksimal dari kami Dinas Perhubungan untuk dapat mendekati target capaian yang seharusnya, dimana ada beberapa faktor yang menjadi kendala ataupun hambatan tercapainya upaya maksimal Dinas Perhubungan diantaranya yaitu; Keterbatasan Anggaran Dinas Perhubungan kabupaten Nias Selatan yang berakibat tidak tertampungnya beberapa kegiatan yang ada didalam Renja PD dari 8 Kegiatan yang tersedia namun yang tertampung hanya 1 Kegiatan saja itupun anggaran untuk kegiatan tersebut sangat terbatas sehingga capaian yang telah ditargetkan tidak maksimal.

Capaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan Pelayaran pada Tahun 2023 sebesar 100% dari Target 100%, Capaian Program ini dapat kami paparkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan telah fokus pada pelayanan Publik di sektor Palayaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kepulauan sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) menganggarkan untuk Belanja Subsidi Kapal Cepat dengan maksimal dengan metode pelaksanaan melalui Nota Kesepahaman atau kerjasama antara Pemkab Nias Selatan dengan Badan Usaha Milik Swasta yang ada di Lingkup Kabupaten Nias Selatan dan Pelaksanaan Program tersebut terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan oleh Masyarakat khususnya Kepulauan dan masyarakat Kabupaten Nias Selatan pada umumnya,

Oleh sebab itu beberapa Kegiatan Lainnya yang menunjang program Pengelolaan Pelayaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena keterbatasan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan namun perlu kami jelaskan bahwa untuk mendukung Program tersebut perlu mempertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana fasilitas angkutan laut Baik Pembangunan Dermaga Pengumpan Lokal maupun Pelabuhan Rakyat di beberapa tempat/Lokasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan khususnya Daerah Kepulauan guna untuk mencapai kinerja pengelolaan pelayaran.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut :

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem SIPD yang membantu kerja bidang-bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan saat ini masih minim dan membutuhkan aparatur yang memiliki keahlian spesifik yang berkaitan dengan tupoksi perhubungan; baik melalui pendidikan formal maupun informal (bimbingan teknis). Serta adanya keterbatasan Kuantitas

pegawai serta belum adanya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan yang pada kondisi tahun 2023 dalam proses usulan ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023, strategi pencapaian sasaran diuraikan dalam 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian sasaran tersebut didistribusikan ke dalam Sekretriati, Bidang Lalu Lintas dan angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan melakukan penilaian kinerja Tahun 2023. Penilaian kinerja ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil).

Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut (input,output dan outcome) maka dilakukan pengukuran kinerja dengan menghitung Nilai Capaian Indikator Kinerja terhadap 3 indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023, masing –masing kegiatan dilakukan pengukurannya dan didapatkan nilai capaian indikator kinerja untuk setiap kegiatan, sebagaimana di tabel 3.1 dibawah ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian tersebut berdasarkan petunjuk teknis dalam Permenpan 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan, diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis :**
“Mewujudkan Pemerintah yang Efektif dan Efisien ,Transparan, Jujur dan Bertanggung jawab”

Tabel Indikator Capaian 1.1

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Penilaian dari inspektorat)	64	92,71 Kategori AA	92,71
Rata rata Capaian Kinerja				92,71

Analisis : Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100 dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan memperoleh nilai 92,71 dengan Kategori AA yang merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan Rincian Sebagai berikut:

PERENCANAAN KINERJA			PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN KINERJA	TOTAL
RENJA/ RENSTR A	RKT	TAPKIN					
9,19	19,40	0	21,88	15,00	10,00	17,24	92,71

2. **Sasaran Strategis :**
“Meningkatkan Akses dari wilayah perdesaan kewilayah kecamatan dan Kecamatan ke ibu kota Kabupaten Nias Selatan”

Tabel : 2.1 Indikator Capaian Kinerja

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
----	-----------	--------	-----------	---------

1	Persentase layanan angkutan laut	75	72	96,00%
2	Persentase layanan angkutan udara	21	21	21%
3	Jumlah Pelabuhan Laut, Udara, terminal Bis	18	15	83,33%

Analisis :

1. Persentase layanan angkutan laut selama tahun 2023 di targetkan sebesar 75% dan terealisasi sebesar 72% atau Capaian Target sebesar 96,00%, ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan umum setiap tahun, dan indikator cakupan layanan fasilitas pengelolaan pelayaran yang ditargetkan sebesar 75% dan realisasi capaian sebesar 72%.
2. Persentase layanan angkutan udara selama tahun 2023 di targetkan sebesar 21% dan terealisasi sebesar 21%, perlu kami jelaskan bahwa target pelayanan pada sektor angkutan udara sangat rendah, disebabkan karena belum beroperasinya Bandar Udara Silambo dan juga Bandar Udara Lasondre yang terletak di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan sangat terbatas dalam beroperasi karena jadwal operasionalnya hanya satu kali dalam satu minggu.
3. Jumlah Pelabuhan Laut, Udara, Terminal Bus ditargetkan berjumlah 18 Unit dan terealisasi berjumlah 15 Unit atau Capaian targetnya 83,33% yang dapat kami jelaskan, antara lain :
 1. Jumlah Bandar Udara di Wilayah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 2 Buah yaitu Bandar Udara Lasondre yang beralamat di Kecamatan Tanah Masa dan Bandara Silambo yang beralamat di Botohilitano Kecamatan Luahagundre. Bandar udara Lasondre ini bukan merupakan dibawah naungan Dinas Perhubungan tetapi langsung dikelola oleh Kementerian Perhubungan dengan Jadwal penerbangan 3 (tiga) kali dalam seminggu dengan Rute Binaka GNS – Lasondre (PP) yang telah di tentukan oleh kementerian Perhubungan. Dan Bandar Udara Silambo yang hingga saat ini belum selesai pembangunanya baik Pembangunan Runway, Terminal Tunggu dan Fasilitas Sarana Prasarananya yang belum lengkap dan memadai dikarenakan keterbatasan anggaran pada Dinas Perhubungan yang mengakibatkan Bandar Udara Silambo tersebut tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya;
 2. Jumlah Dermaga Penyeberangan yang telah dibangun sebelum tahun 2023 sebanyak 11 Unit, ditambah 3 Unit (tiga) dermaga yang telah dibangun

terletak di Desa Gobo Kecamatan Simuk, Desa Tebolo Kecamatan Hibala, dan Desa Bais Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara, Dermaga ini digunakan oleh masyarakat setempat sebagai sarana utama dalam melangsungkan kehidupan karena merupakan pulau yang kecil dan penghasilan utama 80% harus melalui transportasi melalui laut;

3. Jumlah Terminal Bis tipe – C/Tingkat Kecamatan sebanyak 3 Unit yang terletak di Kecamatan Gomo, Kecamatan Lahusa dan Kecamatan Lolowau, Wilayah Kabupaten Nias Selatan, namun perlu kami jelaskan bahwa Terminal Bus tipe-B tingkat Kabupaten di Kabupaten Nias Selatan belum ada. Sehingga besar harapan kami supaya Pembangunan terminal tipe-B di jadikan sebagai Prioritas Utama Pemerintah Daerah karena sudah selayaknya Kabupaten Nias Selatan memiliki Terminal tipe-B dan juga Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada sektor transportasi darat dapat meningkat.

Hal yang menjadi kendala tercapainya target kinerja yang berpengaruh pada realisasi keberhasilan kinerja pada Dinas Perhubungan yaitu keterbatasan Anggaran Dinas Perhubungan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dapat diuraikan pada Tabel T.C.30. sebagai berikut :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Berikut identifikasi permasalahan di Dinas Perhubungan berdasarkan dari tugas dan fungsi pelayanan:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan saat ini masih minim dan membutuhkan aparatur yang memiliki keahlian spesifik yang berkaitan dengan tupoksi perhubungan; baik melalui pendidikan formal maupun informal (bimbingan teknis). Adapun jenis keahlian yang wajib dimiliki oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- Ahli Hukum yang bertugas sebagai perancang regulasi yang berhubungan dengan tupoksi;
- PPNS yang bertugas sebagai pengawas dan penindak pelanggaran dalam berlalulintas;
- Penguji Kendaraan Bermotor (Teknisi PKB) yang bertugas sebagai pemeriksa kelaikan kendaraan/moda angkutan (kelayakan, tertib administrasi dan retribusi);
- Pemeriksa Kapal 7GT kebawah yang bertugas sebagai pemeriksa kelaikan moda transportasi laut (kelayakan, tertib administrasi dan retribusi);

TABEL RINCIAN SELURUH ASN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

No.	NAMA	NIP	Pangkat / Gol.Ruang	JABATAN	Jenis Keahlian
1	Asarudi Giawa, S.Pd	19720415 199903 1 002	IV/b	Sekretaris	Tidak ada
2	Induk Laia, S.Pd.,SH	19700727 200502 1 001	IV/a	Kabid Pengembangan & Keselamatan	Tidak ada
3	Timotius Dakhi, S.Pd	19820511 201001 1 023	III/d	Kabid Lalu Lintas & Angkutan	Tidak ada
4	Amin Yudi Buulolo, ST., M.A.P	19860729 201101 1 008	III/c	Kabid Prasarana	Tidak ada
5	Optinus Bawamenewi, SE	19761016 200112 1 004	III/c	Kasi Perawatan Prasarana	Tidak ada
6	Hubertus Sarumaha, S.Pd., M.A	19841104 200701 1 004	III/c	Kasi LLAJ	Tidak ada
7	Martinus Laia, S.Pd	19770211 200801 1 011	III/c	Kasi Angkutan	Tidak ada
8	Takdir Fau, SE	19851212 201410 1 002	III/c	Kasi Lingkungan Perhubungan	Tidak ada
9	Edisana Duha, SE	19731101 200804 1 001	III/b	Kasi Pengujian Sarana	Tidak ada

10	Adolf Bastian Zamili, SE	19780713 201212 1 002	III/b	Kasi Pengoperasian Prasarana	Tidak ada
11	Amati Bali, A.Md	19861227 201001 1 010	III/b	Plt. Kasi Keselamatan	Tidak ada
12	Oktavizanus Ndruru	19871013 201101 1 003	III/a	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tidak ada
13	Asteti Zebua, S.Kom	19890607 201903 2 009	III/a	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Tidak ada
14	Kantriani Wau, S.Tr	19941102 201903 2 011	III/a	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tidak ada
15	Anugerah Sihura, S.PAK	19800628 200903 1 006	III/d	Staf	Tidak ada
16	Boiolifu Gowasa, S.Kom	19870129 201101 1 002	III/d	Staf	Tidak ada
17	Aldin Dakhi, SKM	19830514 201001 1 019	III/c	Staf	Tidak ada
18	Elizama Halawa	19661025 198712 1 002	III/a	Staf	Tidak ada
19	Dita Nanda Andriaty, S.Tr.Tra	19991029 202302 2 002	III/a	Staf	Tidak ada
20	Ni Luh Ayu Shania, S.Tr.Tra	20000317 202302 2 001	III/a	Staf	Tidak ada
21	Meiman K. Telaumbanua	19810509 200701 1 003	II/d	Staf	Tidak ada
22	Muliati Ganumba	19870310 200611 2 001	II/d	Staf	Tidak ada
23	Julianto Haria	19860713 200701 1 002	II/d	Staf	Tidak ada
24	Singkat Zamili	19850807 200611 1 001	II/d	Staf	Tidak ada
25	Samaludin Giawa, AMa.Pd.SD	19790601 201410 1 004	II/c	Staf	Tidak ada
26	M. Fadel Geovani, A.Md.Tra	20000611 202302 1 001	II/c	Staf	Tidak ada
27	Kadarman Laia	19850629 201212 1 003	II/b	Staf	Tidak ada

Sumber Data Keadaan Dishub Desember 2023.

2. Terminal

Dinas Perhubungan identik dengan ketersediaan infrastruktur terminal.

Kabupaten Nias Selatan memiliki 3 terminal yang terletak di kecamatan Lahusa, Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Gomo.

- a. Terminal dikecamatan Lahusa tidak beroperasi dikarenakan beberapa faktor antara lain : letak geografis yang kurang strategis. Sarana prasarana yang kurang memadai dikarenakan kekurangan anggaran.

- b. Terminal dikecamatan Lolowau tidak beroperasi dikarenakan kurangnya jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas terminal yang mana sarana dan prasarana kurang memadai serta letak geografisnya yang kurang strategis dikarenakan kekurangan anggaran.
- c. Terminal dikecamatan Gomo tidak beroperasi dikarenakan kurangnya jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas terminal yang mana sarana dan prasarana kurang memadai serta letak geografisnya yang kurang strategis dikarenakan kekurangan anggaran.

Dapat disimpulkan kondisi fasilitas ketiga terminal tersebut saat ini tidak layak pakai karena kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana.

3. Moda Transportasi

Minimnya partisipatif dunia usaha di bidang moda transportasi darat membuat fungsi dan kelayakan angkutan tidak sesuai. Moda transportasi darat di Kabupaten Nias Selatan berupa *Pick-up* yang dimodifikasi. Jumlah dan kualitas moda transportasi laut yang masih rendah sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat atas pergerakan/mobilisasi.

4. Kepelabuhanan

Kabupaten Nias Selatan telah memiliki beberapa pelabuhan, Dermaga dan tambatan perahu serta Jembatan labuh/sandar pada terminal yang telah dibangun diwilayah Kabupaten Nias Selatan dengan penjelasan berdasarkan tabel dibawah.

Tabel Kondisi Pelabuhan

No	Nama	Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	Pelabuhan Pulau Tello	PP. Batu	Bukan milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
2	Pelabuhan Lasondre	Lasondre	Bukan milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
3	Pelabuhan Baluta	Kec. Tanah Masa	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
4	Pelabuhan Saeru	Kec. Tanah Masa	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
5	Pelabuhan Tebolo Melayu	Kec. Hibala	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
6	Pelabuhan Lumbui Melayu	Kec. Hibala	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
7	Pelabuhan Sigolong-golong	Kec. Hibala	Bukan milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
8	Pelabuhan Luaha Idano Pono	PP. Batu Barat	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif

Tabel Kondisi Dermaga

No	Nama Dermaga	Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	Dermaga Lumbui	Kecamatan Hibala	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
2	Dermaga Tebolo	Kecamatan Hibala	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
3	Dermaga Bais	Kecamatan PP. Batu	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif

Tabel Kondisi Jembatan Labuh/Tambatan Perahu

No	Nama Jembatan Labuh	Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	Jembatan Labuh Sinar Baru Darodaro	Lahusa	Milik Dishub Kab. Nisel	Tidak aktif
2	Jembatan Labuh Baloho	Jln Baloho	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
3	Jembatan Labuh Idano Pono	Kec. PPB Barat	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
4	Jembatan Labuh Makole	Kec. Tanah Masa	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
5	Jembatan Labuh Lambak	Kec. PP. B Timur	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
6	Jembatan Labuh Baruyu	Kec. Tanah Masa	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif
7	Jembatan Labuh Gobo	Kec. Simuk	Milik Dishub Kab. Nisel	Aktif

Dari ketiga tabel diatas kami jelaskan lebih lanjut bahwa Kondisi Pelabuhan, Dermaga dan Jembatan Labuh/Tambatan Perahu Aktif namun ada beberapa Fasilitas Sarana dan prasarana yang sangat minim dan tidak layak pakai sehingga fungsinya tidak optimal, disebabkan kekurangan alokasi anggaran yang tersedia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan, serta Sumber Daya Manusia yang tidak memadai, Letak Geografis yang sulit dijangkau karna keadaan alam yang ekstrim, yang mengakibatkan Cakupan layanan kepelabuhan tidak tercapai, sehingga banyak masyarakat mengeluh dan tidak dapat menggunakan Pelabuhan, Dermaga atau Tambahan perahu tersebut dengan baik.

2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Perhubungan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim dan kurang profesional ditupoksinya masing masing.

2. Belum dimanfaatkan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan.
3. Perlu *blueprint* dalam perencanaan pembangunan terminal, pelabuhan dan bandara udara yang terintegrasi.
4. Alokasi anggaran untuk pembangunan di bidang perhubungan yang masih rendah.
5. Fasilitas kelengkapan dan keselamatan lalu lintas yang tidak lengkap.
6. Kualitas dan kuantitas moda angkutan jalan dan moda angkutan perairan yang minim.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja PD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan

Dalam membandingkan pelaksanaan Renja SKPD Dinas Perhubungan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 tidak semaksimal mungkin dapat menampung kegiatan-kegiatan yang terdapat pada RENSTRA.

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum Perangkat Daerah Urusan Dinas Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2025. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik RPD 2023-2026, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan Dinas Perhubungan ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nias Selatan bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Nias Selatan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional Transportasi Jalan adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait.
- (2) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan).
- (3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: (1) penataan sistem jaringan dan terminal; (2) manajemen lalu lintas; (3) pemasangan fasilitas dan rambu jalan; (4) penegakan hukum dan disiplin di jalan; (5) mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; (6) kerjasama antar lembaga pemerintah (pusat dan daerah).
- (4) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil.
- (5) Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui:
 - a. Penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal); diantaranya melalui penyusunan RUJTJ (Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan) meliputi penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi nasional sesuai dengan rencana kelas jalan;
 - b. Menyukseskan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dibuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah;

- d. Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ;
- (6) Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.
- (7) Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

Visi dan Misi :

Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2026 terpilih adalah :

“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera” .

Ditindaklanjuti dengan pernyataan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

- 1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.***
- 2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.***
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.***
- 4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.***
- 5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.***

b. Tujuan dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri, dan transparan
2. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan
3. Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat
4. menciptakan situasi kehidupan yang nyaman bagi kehidupan masyarakat

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam penanganan dan Pengamanan Lalulintas agar terjadi koordinasi antara Pemerintah dan Masyarakat, sehingga Ketertiban dan Kenyamanan berlalulintas dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan pembangunan jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai sebagai instrumen untuk mencapai tujuan adalah :

- Sasaran 1 Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab.
- Sasaran 2 Meningkatkan akses dari wilayah perdesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih cepat, tepat, jelas dan tegas serta akuntabilitas pada publik. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achieveable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab

2. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Terlayani kepentingan oleh aparat pemerintah
4. Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat
5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari Kemacetan Berlalu lintas
6. Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman
7. Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup
8. Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik

Indikator Tujuan / Sasaran dan Target kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan Rencana Strategis dan Kondisi akhir RPJMD Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut :

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Kondisi saat ini (Akhir 2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Kondisi Akhir RPJMD (akhir 2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan pembangunan dikawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang	Mewujudkan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Penilaian dari Inspektora	Nilai	46,48	62	64	66	68	70	70
		Meningkatkan akses dari wilayah perdesaan	Persentase layanan angkutan laut	Persen	70	72	75	77	79	81	81
		kecamatan dan kecamatan ke ibu kota kabupaten	Persentase layanan angkutan udara	Persen	21	21	21	21	21	21	21
			Jumlah Pelabuhan Laut, Udara, terminal Bis	Unit	10	16	18	20	22	24	24

c. Program dan Kegiatan 2025

A. Program

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk Implementasi strategi organisasi. Program kerja merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja merupakan penjabaran rinci tentang langkah – langkah yang diambil untuk menjabarkan tujuan dan sasaran.

Dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan di Tahun 2025 menetapkan program –program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayaran

B. Kegiatan

Penetapan tujuan dan sasaran yang merupakan bagian dari perencanaan strategis adalah upaya untuk peningkatan kinerja organisasi. Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Oleh karena itu diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktivitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah disusun.

Berdasarkan program yang telah dirancang maka Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan merencanakan kegiatan-kegiatan sesuai Tabel T-C. 33 sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1** Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 disusun sebagaimana tabel berikut sesuai hasil yang diinput melalui Aplikasi SIPD.

BAB V

PENUTUP

Dengan melihat latar belakang keterbatasan semua sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia, peralatan, pendanaan maupun dengan melihat berbagai tantangan meliputi tantangan kondisi fisik geografis Nias Selatan yang berbukit-bukit dan relatif labil serta rawan bencana, kondisi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, menyebabkan target Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tugas yang harus diemban Bupati, belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Sedangkan untuk meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang, diperlukan rangkaian sosialisasi dan monitoring kegiatan pembangunan yang lebih intensif di seluruh wilayah dan memberikan papan-papan petunjuk mengenai peraturan perundang-undangan tentang Sempadan Bangunan di seluruh pelosok wilayah.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, semoga dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Telukdalam, 29 Juli 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nias Selatan,

OMEGA TELAUMBANUA, SKM., MM

Pembina

NIP. 198311112006111001

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 =7/6	9	10 =(5+7+9)	11 =10/4
1.07				Urusan Wajib										
2.15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
2.15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	30	Dok	6	6	6	100%	6	18	60%
2.15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10	Dok	2	2	2	100%	2	6	60%
			02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	1	1	1	100%	1	3	60%
			03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	1	1	1	100%	1	3	60%
			04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	1	1	1	100%	1	3	60%
			05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	5	Dok	1	1	1	100%	1	3	60%
2.15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan	165	Dok	33	33	33	100%	33	99	60%
2.15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Org/Bln	14	14	14	100%	14	42	60%
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	1	1	1	100%	1	3	60%
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	90	Lap	18	18	18	100%	18	54	60%
2.15	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Tingkat Kehadiran Pegawai	100%	Persen	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
			01	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350	Paket	70	70	70	100%	70	210	60%
			02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Lalulintas	20	Orang	4	4	4	100%	4	12	60%

2.15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100%	Persen	20%	100%	0%	0%	40%	60%	60%
2.15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	4	4	4	100%	4	12	60%
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	4	4	4	100%	4	12	60%
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	12	12	12	100%	12	36	60%
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	12	12	12	100%	12	36	60%
			08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60	Lap	12	12	12	100%	12	36	60%
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	12	12	12	100%	12	36	60%
2.15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Fasilitas barang Milik daerah	100%	Persen	20%	100%	0%	0%	40%	60%	60%
2.15	01	2.07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	5	5	5	100%	5	15	60%
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	1	1	1	100%	1	3	60%
2.15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	Persen	20%	100%	0%	0%	40%	60%	60%
2.15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap	12	12	12	100%	12	36	60%
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	350	Lap	70	70	70	100%	70	210	60%
2.15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	Unit	20%	100%	0%	0%	40%	60%	60%
2.15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	6	6	6	100%	6	18	60%
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1	1	1	100%	1	3	60%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	Unit	12	12	12	100%	12	36	60%
2.15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	100%	Persen	20%	100%	40%	40%	40%	60%	60%
2.15	02	2.02	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	505	Unit	101	101	101	100%	101	303	60%
2.15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun yang Terbangun"	5	Unit	1	1	-	0%	1	2	40%
			02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Kabupaten/kota	500	Unit	100	100	-	0%	100	200	40%
			03	Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500	Unit	100	100	-	0%	100	200	40%
2.15	02	2.03	2	Pengelolaan Terminal Penumpang	Tersedianya Gedung Terminal	5	Unit	1	1	1	100%	1	3	60%
			01	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	5	Unit	1	1	1	100%	1	3	60%

2.15	02	2.04	3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen Rekayasa lalulintas	100%	Persen	40%	100%	40%	40%	40%	60%	60%
			01	Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	360	Unit	80	80	80	100%	70	230	64%
			02	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60	Lap	12	12	12	100%	12	36	60%
2.15	02	2.05	4	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Jalan	200	Lap	40	40	40	100%	40	120	60%
			01	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100	Lap	20	20	20	100%	20	60	60%
			02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan pemantauan sisitem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100	Lap	20	20	20	100%	20	60	60%
2.15	02	2.06	5	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Transportasi Darat	100%	Unit	40%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
			01	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum Untuk jasa Angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	Unit	2	2	2	100%	2	6	60%
2.15	02	2.07	6	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Jaringan Trayek Angkutan kota	100%	Keg	20%	100%	0%	0%	40%	60%	60%
			01	Perumusan kebijakan rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Jaringan Trayek	10	Keg	2	2	2	100%	2	6	60%
			02	Sosialisasi dan Uji Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Rencana Umum Jaringan Trayek	5	Keg	1	1	1	100%	1	3	60%
2.15	02	2.08	7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek	100%	Lap	20%	100%	0%	0%	40%	60%	60%
			01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/Kota dalam sisitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10	Lap	2	2	2	100%	2	6	60%
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Lap	1	1	1	100%	1	3	60%

2.15	02	2.09	8	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah	Terlaksananya Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	100%	Lap	20%	100%	0%	0%	40%	60%	60%
			01	Analisis Tarif kelas ekonomi angkuta orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Lap	1	1	1	100%	1	3	60%
			02	Penyediaan data dan Informasi Tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan Perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Lap	1	1	1	100%	1	3	60%
			03	Pengendalian dan Pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	5	Lap	1	1	1	100%	1	3	60%
2.15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cangkupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
2.15	03	2.01		Penerbitan Izin usaha Angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten /Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan	Terpenuhinya Penerbitan Izin usaha Angkutan laut	10	Keg	2	2	2	100%	2	6	60%
			01	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin usaha Angkutan laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	Dok	1	1	1	100%	1	3	60%
			02	Koordinasi dan Konsultasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkuta laut kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut	5	Lap	1	1	1	100%	1	3	60%
2.15	03	2.02		Penerbitan Izin usaha angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penerbitan Izin usaha Angkutan laut Pelayaran	100%	Persen	20%	100%	0%	0%	40%	60%	60%
			01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	Dok	1	1	1	100%	1	3	60%
			02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran	60	Lap	12	12	12	100%	12,00	36	60%

2.15	03	2.03		Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	Terpenuhinya Penerbitan Izin usaha Angkutan Sungai dan Danau	100%	Lap	20%	100%	0%	0%	0%	20%	20%
			01	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25	Lap	5	5	5	100%	5,0	15	60%
			02	Koordinasi dan Konsultasi pengawasan pelaksanaan izin Usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota penyelenggaraan angkutan sungai dan danau	25	Lap	5	5	5	100%	5	15	60%
2.15	03	2.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal Angkutan laut	60	Lap	12	12	12	100%	12	36	60%
			01	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	Lap	12	12	12	100%	12	36	60%
2.15	03	2.05		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	100%	Persen	20%	100%	0%	0%	40%	60%	60%
			01	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	10	Unit	2	2	2	100%	2	6	60%
			02	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara Pelabuhan Pengumpan Lokal	10	Unit	2	2	2	100%	2	6	60%
			03	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Pelabuhan Pengumpan Lokal	5	Unit	1	1	1	100%	1	3	60%
2.15	03	2.05		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	Unit	20%	100%	0%	0%	40%	60%	60%
			01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	25	Unit	5	5	5	100%	5	15	60%

			02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	10	Unit	2	2	2	100%	2	6	60%
			03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	10	Unit	2	2	2	100%	2	6	60%
			04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan dan Sungai	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	10	Unit	2	2	2	100%	2	6	60%



Isik Dalam, 29 Juli 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nias Selatan,

DEWI OMEGA TELAUMBANUA,SKM.,MM
Pembina
NIP. 198311112006111001

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan Sasaran Strategis : Meningkatkan Akses dari wilayah perdesaan kewilayah kecamatan dan Kecamatan ke ibu kota Kabupaten Nias Selatan

NAMA OPD : DINAS PERHUBUNGAN

No.	Indikator	SATUAN	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase layanan angkutan laut	Persentase	70	72	75	77	79	81	75	-	77	79	Akan Tercapai
2	Persentase layanan angkutan udara	Persentase	21	21	21	21	21	21	21	-	21	21	Akan Tercapai
3	Jumlah Pelabuhan Laut, Udara, terminal Bis	Unit	10	16	18	20	22	24	15	-	20	22	Akan Tercapai

Teluk Dalam, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nias Selatan,

Drs. OMEGA TELAUMBANUA, SKM., MM

Pembina

NIP. 198311112006111001

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan
Berdasarkan Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.	Indikator	SATUAN	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	72.146	58.876	71.576	84.976	104.676	105.776	68.876	-	84.976	104.676	Akan Tercapai
2	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	Unit	2	2	2	2	2	2	1	-	2	2	Akan Tercapai
3	Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	8	14	16	18	20	22	11	-	18	20	Akan Tercapai
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Persen	73%	73	75	77	79	81	75	-	77	79	Akan Tercapai
5	Persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	Persen	99,84	99,83	99,84	99,84	99,84	99,84	99,83	-	99,84	99,84	Akan Tercapai
6	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Persen	70	72	75	77	79	81	72	-	77	79	Akan Tercapai

Teluk Dalam, 29 Juli 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nias Selatan,



DAMIAN OMEGA TELAUMBANUA, SKM., MM
Pembina
NIP. 198311112006111001

TABEL T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Nias Selatan

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISHUBNISEL	Cangkupan Pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	1.267.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISHUBNISEL	Cangkupan Pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	1.267.000.000	Mendukung Pelayanan Administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6 Dok	45.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6 Dok	45.500.000	Mendukung penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dok	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dok	8.000.000	Mendukung penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen RKA perangkat daerah yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen RKA perangkat daerah yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Mendukung Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen Perubahan RKA perangkat daerah yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen Perubahan RKA perangkat daerah yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Mendukung penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen DPA perangkat daerah yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen DPA perangkat daerah yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Mendukung Penyusunan DPA - SKPD
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen Perubahan DPA perangkat daerah yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen Perubahan DPA perangkat daerah yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Mendukung Penyusunan Perubahan DPA - SKPD
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Mendukung Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	33 Dok	85.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	33 Dok	85.000.000	Mendukung penyusunan Administrasi Keuangan perangkat daerah
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISHUBNISEL	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	70.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISHUBNISEL	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	70.000.000	Mendukung Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	DISHUBNISEL	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahunan	1 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	DISHUBNISEL	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahunan	1 Laporan	7.500.000	Mendukung penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen Laporan Keuangan /bulanan /Triwulan /semesteran	18 laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DISHUBNISEL	Jumlah dokumen Laporan Keuangan /bulanan /Triwulan /semesteran	18 laporan	7.500.000	Mendukung penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Ssemesteran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISHUBNISEL	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian perangkat daerah	198 orang	100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISHUBNISEL	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian perangkat daerah	198 orang	100.000.000	Mendukung penyusunan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DISHUBNISEL	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan yang diadakan	70 Stel	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DISHUBNISEL	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan yang diadakan	70 Stel	50.000.000	Mendukung peningkatan kedisiplinan dan semangat kerja ASN
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISHUBNISEL	Jumlah pegawai yang mengikuti kesamaptaan Jasmani, Pelatihan Teknik Dasar Beladiri Tim Pengendali Lalulintas dan pendidikan, pelatihan berdasrakan tugas dan fungsi	4 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISHUBNISEL	Jumlah pegawai yang mengikuti kesamaptaan Jasmani, Pelatihan Teknik Dasar Beladiri Tim Pengendali Lalulintas dan pendidikan, pelatihan berdasrakan tugas dan fungsi	4 Orang	50.000.000	Mendukung penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan dalam mengsosialisasikan tertib berlalu lintas.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISHUBNISEL	tersedianya layanan pendukung administrasi umum perangkat daerah	100%	400.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISHUBNISEL	tersedianya layanan pendukung administrasi umum perangkat daerah	100%	400.000.000	Mendukung penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISHUBNISEL	Tersedianya penerangan gedung kantor	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISHUBNISEL	Tersedianya penerangan gedung kantor	12 Paket	20.000.000	Mendukung penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah
02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	DISHUBNISEL	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Perlengkapan kantor	12 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	DISHUBNISEL	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Perlengkapan kantor	12 Paket	30.000.000	Mendukung penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah

04	Penyediaan bahan Logistik kantor	DISHUBISEL	Tersedianya makanan dan minuman	12 Paket	100.000.000	Penyediaan bahan Logistik kantor	DISHUBISEL	Tersedianya makanan dan minuman	12 Paket	100.000.000	Mendukung penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISHUBISEL	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISHUBISEL	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	30.000.000	Mendukung penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah
08	Fasilitati Kunjungan Tamu	DISHUBISEL	Tersedianya makanan dan minuman Tamu	12 Laporan	10.000.000	Fasilitati Kunjungan Tamu	DISHUBISEL	Tersedianya makanan dan minuman Tamu	12 Laporan	10.000.000	Mendukung penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISHUBISEL	Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	12 Laporan	210.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISHUBISEL	Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	12 Laporan	210.000.000	Mendukung penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	DISHUBISEL	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 Unit	300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	DISHUBISEL	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 Unit	300.000.000	Mendukung penyelenggaraan pengadaan Barang Milik Daerah kebutuhan Dinas Perhubungan
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISHUBISEL	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISHUBISEL	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	200.000.000	Mendukung pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUBISEL	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUBISEL	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	100.000.000	Mendukung pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISHUBISEL	Tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	206.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISHUBISEL	Tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	206.000.000	Mendukung penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISHUBISEL	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat	12 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISHUBISEL	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat	12 Laporan	6.000.000	Mendukung penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISHUBISEL	Tersedianya honorarium tenaga honorer	70 Orang	200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISHUBISEL	Tersedianya honorarium tenaga honorer	70 Orang	200.000.000	Mendukung penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISHUBISEL	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	37 Unit	123.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISHUBISEL	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	37 Unit	123.000.000	Mendukung pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISHUBISEL	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dengan baik	6 Unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISHUBISEL	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dengan baik	6 Unit	120.000.000	Mendukung pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	DISHUBISEL	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik	1 Unit	2.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	DISHUBISEL	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik	1 Unit	2.000.000	Mendukung pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUBISEL	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	1 Unit	1.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISHUBISEL	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	1 Unit	1.000.000	Mendukung pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah
	Penataan Organisasi	DISHUBISEL	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	7.500.000	Penataan Organisasi	DISHUBISEL	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	7.500.000	Mendukung penyelenggaraan Koordinasi dan penyusunan kinerja pemerintah Daerah
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	DISHUBISEL	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintahan yang disusun	1 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	DISHUBISEL	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintahan yang disusun	1 Laporan	7.500.000	Mendukung penyelenggaraan Koordinasi dan penyusunan kinerja pemerintah Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUBISEL	Cangkupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	511.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUBISEL	Cangkupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	511.000.000	Mendukung Visi & Misi Kepala Daerah nomor 5 yakni Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat
	Penyediaan Perlengkapan Jalan dijalan Kabupaten / Kota	DISHUBISEL	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	201 Unit	101.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan dijalan Kabupaten / Kota	DISHUBISEL	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	201 Unit	101.000.000	Mendukung penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan dalam tertib berlalu Lintas.
01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	"Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun yang Terbangun"	1 Unit	50.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	"Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun yang Terbangun"	1 Unit	50.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	100 Unit	50.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	100 Unit	50.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab.Nias Selatan	Terpeliharanya Prasarana Jalan	100 Unit	1.000.000	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab.Nias Selatan	Terpeliharanya Prasarana Jalan	100 Unit	1.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Gedung Terminal	1 Unit	100.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Gedung Terminal	1 Unit	100.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.

01	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab.Nias Selatan	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	100.000.000	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab.Nias Selatan	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	100.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200 Unit	1.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200 Unit	1.000.000	Mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan dalam hal peningkatan PAD Nias Selatan.
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	200 Unit	1.000.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	200 Unit	1.000.000	Mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan dalam hal peningkatan PAD Nias Selatan.
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Cakupan layanan pengadaan, pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	100%	101.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Cakupan layanan pengadaan, pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	100%	102.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
02	Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab.Nias Selatan	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan dipelihara dengan baik	50 unit	100.000.000	Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab.Nias Selatan	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan dipelihara dengan baik	50 unit	100.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
03	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Penertiban Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Penertiban Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4 Laporan	500.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4 Laporan	1.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Jalan	40 Laporan	1.000.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Jalan	40 Laporan	2.000.000	Mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan dalam hal peningkatan PAD Nias Selatan.
01	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	500.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	1.000.000	Mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan dalam hal peningkatan PAD Nias Selatan.
02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20 Laporan	500.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20 Laporan	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan di bidang LLAJ
	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang/baran	3 unit	200.000.000	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang/baran	3 unit	200.000.000	Mendukung penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan di bidang LLAJ
01	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	jumlah angkutan umum yang tersedia	3 Unit	200.000.000	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	jumlah angkutan umum yang tersedia	3 Unit	200.000.000	Mendukung penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan di bidang LLAJ
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Jaringan Trayek Angkutan kota	1 Unit	2.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Jaringan Trayek Angkutan kota	1 Unit	2.000.000	Mendukung penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan di bidang LLAJ
	Perumusan kebijakan rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Jaringan Trayek	2 Dok	1.000.000	Perumusan kebijakan rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Jaringan Trayek	2 Dok	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Rencana Umum Jaringan Trayek	1 Dok	1.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Rencana Umum Jaringan Trayek	1 Dok	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek	3 Keg	2.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek	3 Keg	2.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.

	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Keg	1.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Keg	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keg	1.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keg	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	1	3.000.000	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	1	3.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
	Analisis Tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota orang dan angkutan	1 Dok	1.000.000	Analisis Tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota orang dan angkutan	1 Dok	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
	Penyediaan data dan Informasi Tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan Perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota angkutan orang dan angkutan Perkotaan dan pedesaan	1 Dok	1.000.000	Penyediaan data dan Informasi Tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan Perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota angkutan orang dan angkutan Perkotaan dan pedesaan	1 Dok	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
	Pengendalian dan Pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.000.000	Pengendalian dan Pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab,nas selatan	Cangkupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	100%	1.222.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab,nas selatan	Cangkupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	100%	1.222.000.000	Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan di Bidang Pengelolaan Pelayaran
	Penerbitan Izin usaha Angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten /Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Tersedianya layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	100%	20.000.000	Penerbitan Izin usaha Angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten /Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Tersedianya layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	100%	20.000.000	Mendukung penyelenggaraan pengelolaan pelayaran
01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab.Nias Selatan	Terpenuhinya Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin usaha Angkutan laut	12 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab.Nias Selatan	Terpenuhinya Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin usaha Angkutan laut	12 Dokumen	10.000.000	Mendukung penyelenggaraan pengelolaan pelayaran
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut	12 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut	12 Laporan	10.000.000	Mendukung penyelenggaraan pengelolaan Angkutan pelayaran
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran Jumlah penumpang kapal laut per tahun	1 Laporan	200.000.000	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran Jumlah penumpang kapal laut per tahun	1 Laporan	200.000.000	Mendukung penyelenggaraan pengelolaan Angkutan pelayaran
02	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nias Selatan	Tersedianya Operasional Pengoperasian Kapal Lintas Penyeberangan dalam daerah Kabupaten Nias Selatan	1 Laporan	200.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nias Selatan	Tersedianya Operasional Pengoperasian Kapal Lintas Penyeberangan dalam daerah Kabupaten Nias Selatan	1 Laporan	200.000.000	Mendukung penyelenggaraan pengelolaan Angkutan pelayaran

	Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Tersedianya layanan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal	1 Unit	800.000.000	Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Tersedianya layanan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal	1 Unit	800.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No. 4 yakni :Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nias Selatan	Terpenuhinya subsidi Kapal Telukdalam - Tello - Hibala	1 Laporan	800.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nias Selatan	Terpenuhinya subsidi Kapal Telukdalam - Tello - Hibala	1 Laporan	800.000.000	Mendukung pengoperasian Kapal Bus Air roro yang melayani lintas penyeberangan antar Pulau dalam Kabupaten.
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	DISHUBNISEL	Tersedianya Dermaga Pungupan Lokal yang memadai	1 Unit	101.000.000	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	DISHUBNISEL	Tersedianya Dermaga Pungupan Lokal yang memadai	1 Unit	101.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No. 4 yakni :Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan lokal	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di bangun	1 Unit	100.000.000	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan lokal	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di bangun	1 Unit	100.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No. 4 yakni :Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara.	1 Unit	1.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara.	1 Unit	1.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No.2 yakni : 2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	DISHUBNISEL	Tersedianya Pelabuhan sungai dan danau yang memadai	1 Unit	101.000.000	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	DISHUBNISEL	Tersedianya Pelabuhan sungai dan danau yang memadai	1 Unit	101.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No.2 yakni : 2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang di bangun	1 Unit	100.000.000	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang di bangun	1 Unit	100.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No.2 yakni : 2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara.	1 Unit	1.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara.	1 Unit	1.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No.2 yakni : 2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
JUMLAH					3.000.000.000	JUMLAH					3.000.000.000



Teluk Dalam, 29 Juli 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nias Selatan,

DANIEL OMEGA TELAUMBANUA, SKM., MM
Pembina
NIP. 198311112006111001

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Nias Selatan

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Kebutuhan Dana	Catatan
-1					-2	-3	-4		-5	-6
2	15.02	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUBNISEL	Cangkupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	511.000.000	Mendukung Visi & Misi Kepala Daerah nomor 5 yakni Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat
2	51.02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan dijalan Kabupaten / Kota	DISHUBNISEL	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	201 Unit	101.000.000	Mendukung penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan dalam tertib berlalu Lintas.
2	51.02	2	02	02	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	"Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun yang Terbangun"	1 Unit	50.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
2	51.02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	100 Unit	50.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
2	51.02	2	02	02	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab.Nias Selatan	Terpeliharanya Prasarana Jalan	100 Unit	1.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
2	51.02	2	02	02	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Gedung Terminal	1 Unit	100.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
2	51.02	2	02	02	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab.Nias Selatan	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	100.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
2	51.02	2	02	02	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200 Unit	1.000.000	Mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan dalam hal peningkatan PAD Nias Selatan.
2	51.02	2	02	02	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	200 Unit	1.000.000	Mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan dalam hal peningkatan PAD Nias Selatan.
2	51.02	2	02	02	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Cakupan layanan pengadaan, pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	ada/tidak ada	101.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
2	51.02	2	02	03	Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab.Nias Selatan	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan dipelihara dengan baik	50 unit	100.000.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
2	51.02	2	03		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Penertiban Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.

2	51.02	2	03	02	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4 Laporan	500.000	Prioritas pertama mendukung kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tupoksi Dinas Perhubungan.
2	51.02	2	05		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Jalan	40 Laporan	1.000.000	Mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan dalam hal peningkatan PAD Nias Selatan.
2	51.02	2	05	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	500.000	Mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan dalam hal peningkatan PAD Nias Selatan.
2	51.02	2	06		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20 Laporan	500.000	Mendukung penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan di bidang LLAJ
2	51.02	2	06	02	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang/baran	3 unit	200.000.000	Mendukung penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan di bidang LLAJ
2	51.02	2	06	03	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	jumlah angkutan umum yang tersedia	3 Unit	200.000.000	Mendukung penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan di bidang LLAJ
2	51.02	2	06	05	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Nias Selatan	Tersedianya Jaringan Trayek Angkutan kota	1 Unit	2.000.000	Mendukung penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan di bidang LLAJ
2	51.02	2	09		Perumusan kebijakan rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Jaringan Trayek	2 Dok	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
2	51.02	2	09	01	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Rencana Umum Jaringan Trayek	1 Dok	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
2	51.02	2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek	3 Keg	2.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
2	51.02	2	14	02	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Keg	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
2	51.02	2	16		Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keg	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
2	51.02	2	16	01	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	1	3.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.

2	51.02	2	16	02	Analisis Tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota orang dan angkutan	1 Dok	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
2	51.02	2	16	03	Penyediaan data dan Informasi Tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan Perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota angkutan orang dan angkutan Perkotaan dan perdesaan	1 Dok	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
2	15.03				Pengendalian dan Pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.000.000	Mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Transportasi Darat.
2	15.03	2	01		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab,nas selatan	Cangkupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	100%	1.222.000.000	Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Dinas Perhubungan di Bidang Pengelolaan Pelayaran
2	15.03	2	01	01	Penerbitan Izin usaha Angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten /Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Tersedianya layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	ada/tidak ada	20.000.000	Mendukung penyelenggaraan pengelolaan pelayaran
2	15.03	2	01	02	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab.Nias Selatan	Terpenuhinya Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin usaha Angkutan laut	12 Dokumen	10.000.000	Mendukung penyelenggaraan pengelolaan pelayaran
2	15.03	2	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut	12 Laporan	10.000.000	Mendukung penyelenggaraan pengelolaan Angkutan pelayaran
2	15.03	2	02	01	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran Jumlah penumpang kapal laut per tahun	1 Laporan	200.000.000	Mendukung penyelenggaraan pengelolaan Angkutan pelayaran
2	15.03	2	02	02	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nias Selatan	Tersedianya Operasional Pengoperasian Kapal Lintas Penyeberangan dalam daerah Kabupaten Nias Selatan	1 Laporan	200.000.000	Mendukung penyelenggaraan pengelolaan Angkutan pelayaran
2	15.03	2	06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	DISHUBNISEL	Tersedianya layanan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal	1 Unit	800.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No. 4 yakni :Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
2	15.03	2	06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Nias Selatan	Terpenuhinya subsidi Kapal Telukdalam - Tello - Hibala	1 Laporan	800.000.000	Mendukung pengoperasian Kapal Bus Air roro yang melayani lintas penyeberangan antar Pulau dalam Kabupaten.

2	15.03	2	07		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	DISHUBNISEL	Tersedianya Dermaga Pengumpan Lokal yang memadai	1 Unit	101.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No. 4 yakni :Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
2	15.03	2	07	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan lokal	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di bangun	1 Unit	100.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No. 4 yakni :Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
2	15.03	2	12		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara.	1 Unit	1.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No.2 yakni : 2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
2	15.03	2	12	02	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	DISHUBNISEL	Tersedianya Pelabuhan sungai dan danau yang memadai	1 Unit	101.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No.2 yakni : 2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
2	15.03	2	12	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang di bangun	1 Unit	100.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No.2 yakni : 2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
2	15.03	2	12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara.	1 Unit	1.000.000	Mendukung visi & Misi Kepala Daerah No.2 yakni : 2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.



Teluk Dalam, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nias Selatan,

DAMAS OMEGA TELAUMBANUA,SKM.,MM

Pembina

NIP. 198311112006111001

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan maju Tahun 2026
Kabupaten Nias Selatan

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cangkupan Pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	DISHUBNISEL	100%	1.267.000.000			100%	1.267.000.000
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	DISHUBNISEL	6 Dok	45.500.000	DAU		6 Dok	45.500.000
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	DISHUBNISEL	2 Dok	8.000.000	DAU		2 Dok	8.000.000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA perangkat daerah yang tersusun	DISHUBNISEL	1 Dok	7.500.000	DAU		1 Dok	7.500.000
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA perangkat daerah yang tersusun	DISHUBNISEL	1 Dok	7.500.000	DAU		1 Dok	7.500.000
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA perangkat daerah yang tersusun	DISHUBNISEL	1 Dok	7.500.000	DAU		1 Dok	7.500.000
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA perangkat daerah yang tersusun	DISHUBNISEL	1 Dok	7.500.000	DAU		1 Dok	7.500.000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	DISHUBNISEL	1 Dok	7.500.000	DAU		1 Dok	7.500.000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	DISHUBNISEL	33 Dok	85.000.000	DAU		33 Dok	85.000.000
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	DISHUBNISEL	14 Bln	70.000.000	DAU		14 Bln	70.000.000
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahunan	DISHUBNISEL	1 Laporan	7.500.000	DAU		1 Laporan	7.500.000
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan /bulanan /Triwulan /semesteran	DISHUBNISEL	18 laporan	7.500.000	DAU		18 laporan	7.500.000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian perangkat daerah	DISHUBNISEL	198 orang	100.000.000	DAU		198 orang	100.000.000
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakian dinas dan atribut kelengkapan yang diadakan	DISHUBNISEL	70 Stel	50.000.000	DAU		70 Stel	50.000.000

2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti kesamaptaaan Jasmani, Pelatihan Teknik Dasar Beladiri Tim Pengendali Lalulintas dan pendidikan, pelatihan berdasrakan tugas dan fungsi	DISHUBNISEL	4 Orang	50.000.000	DAU		4 Orang	50.000.000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya layanan pendukung administrasi umum perangkat daerah	DISHUBNISEL	ada/tidak ada	400.000.000	DAU		ada/tidak ada	400.000.000
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan gedung kantor	DISHUBNISEL	12 Paket	20.000.000	DAU		12 Paket	20.000.000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Perlengkapan kantor	DISHUBNISEL	12 Paket	30.000.000	DAU		12 Paket	30.000.000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik kantor	Tersedianya makanan dan minuman	DISHUBNISEL	12 Paket	100.000.000	DAU		12 Paket	100.000.000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DISHUBNISEL	12 Paket	30.000.000	DAU		12 Paket	30.000.000
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman Tamu	DISHUBNISEL	12 Laporan	10.000.000	DAU		12 Laporan	10.000.000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	DISHUBNISEL	12 Laporan	210.000.000	DAU		12 Laporan	210.000.000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	DISHUBNISEL	6 Unit	300.000.000	DAK-FISIK		6 Unit	300.000.000
2	15	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	DISHUBNISEL	5 Unit	200.000.000	DAK-FISIK		5 Unit	200.000.000
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	DISHUBNISEL	1 Unit	100.000.000	DAK-FISIK		1 Unit	100.000.000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	DISHUBNISEL	100%	206.000.000	DAU		100%	206.000.000
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat	DISHUBNISEL	12 Laporan	6.000.000	DAU		12 Laporan	6.000.000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium tenaga honorer	DISHUBNISEL	70 Orang	200.000.000	DAU		70 Orang	200.000.000
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	DISHUBNISEL	37 Unit	123.000.000	DAU		37 Unit	123.000.000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dengan baik	DISHUBNISEL	6 Unit	120.000.000	DAU		6 Unit	120.000.000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik	DISHUBNISEL	1 Unit	2.000.000	DAU		1 Unit	2.000.000
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	DISHUBNISEL	1 Unit	1.000.000	DAU		1 Unit	1.000.000

2	15	01	02.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	DISHUBNISEL	1 Laporan	7.500.000	DAU		1 Laporan	7.500.000
2	15	01	02.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintahan yang disusun	DISHUBNISEL	1 Laporan	7.500.000	DAU		1 Laporan	7.500.000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cangkupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	DISHUBNISEL	100%	511.000.000	DAU/DAK-FISIK		100%	511.000.000
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	DISHUBNISEL	201 Unit	101.000.000	DAU/DAK-FISIK		201 Unit	101.000.000
2	15	02	2.02	02	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	"Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun yang Terbangun"	Kab.Nias Selatan	1 Unit	50.000.000	DAK-FISIK		1 Unit	50.000.000
				02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	Kab.Nias Selatan	100 Unit	50.000.000	DAK-FISIK		100 Unit	50.000.000
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Terpeliharanya Prasarana Jalan	Kab.Nias Selatan	100 Unit	1.000.000	DAU		100 Unit	1.000.000
				03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya Gedung Terminal	Kab.Nias Selatan	1 Unit	100.000.000	DAK-FISIK		1 Unit	100.000.000
				03	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Kab.Nias Selatan	1 Unit	100.000.000	DAK-FISIK		1 Unit	100.000.000
				03	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Nias Selatan	200 Unit	1.000.000	DAU		200 Unit	1.000.000
				03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Nias Selatan	200 Unit	1.000.000	DAU		200 Unit	1.000.000
				03	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan pengadaan, pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	DISHUBNISEL	ada/tidak ada	101.000.000	DAU/DAK-FISIK		ada/tidak ada	102.000.000
2	15	02	2.02	03	Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan yang yang tersedia dan dipelihara dengan baik	Kab.Nias Selatan	50 unit	100.000.000	DAK-FISIK		50 unit	100.000.000
	15	2	02.05		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penertiban Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	12 Dokumen	500.000	DAU		12 Dokumen	1.000.000
	15	2	.2.05	3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kab.Nias Selatan	4 Laporan	500.000	DAU		4 Laporan	1.000.000

					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Jalan	Kab.Nias Selatan	40 Laporan	1.000.000	DAU		40 Laporan	2.000.000
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Nias Selatan	20 Laporan	500.000	DAU		20 Laporan	1.000.000
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab.Nias Selatan	20 Laporan	500.000	DAU		20 Laporan	1.000.000
2	15	02	2.06	02	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang/baran	DISHUBNISEL	3 unit	200.000.000	DAK-FISIK		3 unit	200.000.000
2	15	02	2.06	03	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah angkutan umum yang tersedia	DISHUBNISEL	3 Unit	200.000.000	DAK-FISIK		3 Unit	200.000.000
2	15	02	2.06	05	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Jaringan Trayek Angkutan kota	Kab.Nias Selatan	1 Unit	2.000.000	DAU		1 Unit	2.000.000
2	15	02	2.09		Perumusan kebijakan rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Jaringan Trayek	Kab.Nias Selatan	2 Dok	1.000.000	DAU		2 Dok	1.000.000
2	15	02	2.09	01	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Rencana Umum Jaringan Trayek	Kab.Nias Selatan	1 Dok	1.000.000	DAU		1 Dok	1.000.000
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek	Kab.Nias Selatan	3 Keg	2.000.000	DAU		3 Keg	2.000.000
2	15	02	2.14	02	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab.Nias Selatan	2 Keg	1.000.000	DAU		2 Keg	1.000.000
2	15	02	2.16		Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	1 Keg	1.000.000	DAU		1 Keg	1.000.000
2	15	02	2.16	01	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	Kab.Nias Selatan	1	3.000.000	DAU		1	3.000.000

2	15	02	2.16	02	Analisis Tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota orang dan angkutan	Kab.Nias Selatan	1 Dok	1.000.000	DAU		1 Dok	1.000.000
2	15	02	2.16	03	Penyediaan data dan Informasi Tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan Perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota angkutan orang dan angkutan Perkotaan dan perdesaan	Kab.Nias Selatan	1 Dok	1.000.000	DAU		1 Dok	1.000.000
2	15	03			Pengendalian dan Pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Nias Selatan	1 Laporan	1.000.000	DAU		1 Laporan	1.000.000
2	15	03	2.01		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cangkupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Kab,nas selatan	100%	1.222.000.000	DAU		100%	1.222.000.000
2	15	03	2.01	01	Penerbitan Izin usaha Angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten /Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	DISHUBNISEL	ada/tidak ada	20.000.000	DAU		ada/tidak ada	20.000.000
2	15	03	2.01	02	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terpenuhinya Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin usaha Angkutan laut	Kab.Nias Selatan	12 Dokumen	10.000.000	DAU		12 Dokumen	10.000.000
2	15	03	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut	Kab.Nias Selatan	12 Laporan	10.000.000	DAU		12 Laporan	10.000.000
2	15	03	2.02	01	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran Jumlah penumpang kapal laut per tahun	DISHUBNISEL	1 Laporan	200.000.000	DAU/SUBSIDI		1 Laporan	200.000.000
2	15	03	2.02	02	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pengoperasian Kapal Lintas Penyeberangan dalam daerah Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten Nias Selatan	1 Laporan	200.000.000	DAU/SUBSIDI		1 Laporan	200.000.000
2	15	3	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal	DISHUBNISEL	1 Unit	800.000.000	DAU/SUBSIDI		1 Unit	800.000.000

2	15	3	2.06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya subsidi Kapal Telukdalam - Tello - Hibala	Kabupaten Nias Selatan	1 Laporan	800.000.000	DAU/SUBSIDI		1 Laporan	800.000.000
2	15	03	2.07		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Dermaga Pungumpan Lokal yang memadai	DISHUBNISEL	1 Unit	101.000.000	DAU		1 Unit	101.000.000
2	15	03	2.07	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di bangun	Kabupaten Nias Selatan	1 Unit	100.000.000	DAK-FISIK		1 Unit	100.000.000
2	15	03	02.12		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara.	Kabupaten Nias Selatan	1 Unit	1.000.000	DAU		1 Unit	1.000.000
2	15	03	2.07	02	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersedianya Pelabuhan sungai dan danau yang memadai	DISHUBNISEL	1 Unit	101.000.000	DAU/DAK		1 Unit	101.000.000
				02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang di bangun	Kabupaten Nias Selatan	1 Unit	100.000.000	DAK-FISIK		1 Unit	100.000.000
				02	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara.	Kabupaten Nias Selatan	1 Unit	1.000.000	DAU		1 Unit	1.000.000
TOTAL									3.000.000.000				3.000.000.000


 Teluk Dalam, 29 Juli 2024
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Nias Selatan,
OMEGA TELAUMBANUA,SKM.,MM
 Pembina
 NIP. 198311112006111001

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	B Nilai/ Predikat 100 Persen			100 Persen B Nilai/ Predikat	1.265.000.000,00						B Nilai/ Predikat 100 Persen	1.265.000.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	-			6 Dokumen	45.500.000,00			-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-	-	45.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan	-			33 Dokumen	85.000.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-	-	85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	70.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	-		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Presentase Tingkat Kehadiran Pegawai</i>	-			100 Persen	100.000.000,00			-	Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				70 Paket	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan layanan administrasi perkantotan yang tertangani</i>	-			100 Persen	398.000.000,00			-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-	-	398.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	30.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	100.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kapasitas dan akunta bilitas kinerja pegawai	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	30.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	210.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya Fasilitas barang milik daerah</i>	-			100 Persen	300.000.000,00			-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	200.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	206.000.000,00			-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-	-	206.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				70 Laporan	200.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya barang milik daerah</i>	-			100 Persen	123.000.000,00			-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-	-	123.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	120.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Penyelenggaraan penataan dokumen koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	-			1 Laporan	7.500.000,00			-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-	-	7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembaga an yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat persentase keselamatan lalu lintas didalam kabupaten	81.00 Poin 99,84 Perse n			79.00 Poin 99,84 Persen	513.000.000,00						81.00 Poin 99,84 Perse n	513.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	-			101 Unit	101.000.000,00			Memperkua t Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatk an pemban gunan Infra struktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	-	-	101.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatk an pemban gunan Infra struktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				100 Unit	50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatk an pemban gunan Infra struktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya Gedung Terminal	-			1 Unit	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya pengujian berkala kendaraan bermotor	-			200 Unit	1.000.000,00			-	-	-	-	1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				200 Unit	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	-			100 Persen	102.000.000,00			-	-	-	-	102.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				50 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan jalan	-			40 Laporan	2.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				20 Laporan	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				20 Laporan	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Angkutan Transportasi Darat</i>	-			2 Unit	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				3 Unit	200.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya jaringan trayek Angkutan Kota</i>	-			3 Dokumen	2.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek</i>	-			3 Kegiatan	2.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				2 Unit	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang</i>	-			3 Kegiatan	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran Jumlah penumpang kapal laut per tahun	81.00 Perse n 105776 Ora ng			79.00 Persen 104676 Orang	1.222.000.000,00						81.00 Perse n 105776 Ora ng	1.222.000.000,00	
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terpenuhinya penerbitan izin usaha angkutan laut</i>	-			2 Kegiatan	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Cakupan layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	-			1 Laporan	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya operasional pengoperasian kapal lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten nias selatan	-			1 laporan	800.000.000,00			-	-	-	-	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	800.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	-			100 Persen	101.000.000,00			-	-	-	-	101.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	-			100 Persen	101.000.000,00			-	Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-	-	101.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H							3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	